

**Kekuatan Hukum *Visum et Repertum*  
sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHAP dan  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
*Antory Royan Adyan*  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

**Abstrak**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, hubungan dengan orang lain tersebut bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena telah melanggar undang-undang. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku atau literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian visum adalah sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materil karena hakim dibatasi dengan asas keyakinan hakim dan asas penerapan batas minimum pembuktian sehingga unsur keyakinan hakimlah yang menjadi dominan.

**Kata Kunci:** *visum et repertum, kekerasan dalam rumah tangga*

**I. PENDAHULUAN**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hubungan dengan orang lain bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah, mengingat setiap manusia itu memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga munculnya Hukum Alam. Hukum Alam tersebut sangat mengikat didalam kehidupan masyarakat. Apabila dibiarkan akan mengacaukan dan memperpanjang konflik kemanusiaan yang mengakibatkan adanya kesenjangan di lingkungan masyarakat.

Akibat hubungan dengan orang lain tersebut sering menimbulkan tindakan kekerasan, di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan, Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai

“*second class citizen*” makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul) , psikologis (pelecehan, teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah, di-PHK).

Kekerasan terhadap perempuan (*Violence against women*) selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi (*domestic violence*) dan rahasia atau aib rumah tangga sehingga sangat tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain padahal segala tindak kekerasan terhadap rumah tangga menurut Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh PBB tahun 1993 menyebutkan kekerasan domestik harus disebut kejahatan demikian juga UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT yang disahkan pada 22 September 2004 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) menyiratkan dalam pasal-pasalanya perlawanan terhadap pelaku kekerasan terhadap seseorang dalam rumah tangganya, yaitu dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum (polisi dan pengadilan).

## **II. METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai bahan penunjang untuk kelengkapan data dalam melakukan analisis data normatif.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP dan UU PKDRT**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara



Bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi atau tidak karena bisa saja fakta-fakta yang dihadapkan kepada hakim oleh salah satu pihak dibantah oleh pihak lain. Pembuktian dalam menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah: “merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya)”.

Berikut ini dijabarkan Tabel tentang Alat bukti yang sah menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

<b>Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 KUHP</b>	<b>Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT</b>
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa	Keterangan seorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya

Pasal 184 ayat 1 KUHP menegaskan Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Oleh karenanya ada 5 (lima) alat bukti yang sah yang sudah ditentukan dalam KUHP, jadi tidak perlu pula dibatasi dengan pengakuan terdakwa (sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 55 UU PKDRT) karena alat bukti pengakuan terdakwa akan sulit diperoleh untuk pembuktian di muka sidang.



## 2. Kekuatan Pembuktian Visum sebagai Keterangan Ahli

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya. Wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu dalam bentuk laporan yang dalam hal ini berbentuk *visum et repertum*, dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan : “ Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persolan yang timbul di sidang pengadilan. Apabila diteliti Bab I Ketentuan Umum angka 28 ditulis; Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Susunan kalimat tersebut di atas menunjukkan secara negatif, pertama, bahwa bukan keterangan seorang ahli jika diberikan tanpa keahlian tertentu pada orang yang bersangkutan. Kedua, keterangan dimaksud diberikan dengan tujuan memperjelas suatu perkara pidana.

Membuat terang suatu perkara pidana ini jelas harus menjadi tujuan dari keterangan yang diberikan seorang ahli; sehingga demikian seorang ahli hanya akan memberikan keterangan (tanpa rekayasa) semua fakta yang ada dari hasil pemeriksaannya (misalnya dalam sebuah *visum et repertum* korban kekerasan, pembunuhan). Sehingga apa yang telah diungkapkan seorang ahli tersebut ialah kebenaran faktual. Sedangkan kebenaran faktual ini belum tentu sama pengertiannya dengan pengertian kebenaran menurut ilmu hukum (kebenaran yuridis).

Berkenaan dengan penjabaran di atas bila memang demi kepentingan guna mencari kebenaran agar terangnya suatu peristiwa pidana hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli. Keterangan Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi hakim tidak pula wajib untuk menuruti pendapat ahli tersebut bilamana pendapat ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.



Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah korban mati karena diracun atau dicekik. Tetapi, siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli. Sehingga apabila beberapa keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama, sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama maka berapa banyak pun keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.

Tetapi tanpa mengurangi pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, secara kasuistis dua atau lebih alat bukti keterangan ahli dapat dinilai merupakan dua atau beberapa alat bukti, yang harus dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

### 3. **Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai Keterangan Surat**

*Visum et repertum* juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah berupa alat bukti surat maka perlu diketahui Sampai sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat? Apakah alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan? Sebelumnya perlu diketahui bahwa secara tegas dalam Pasal 55 Undang-undang PKDRT menyebutkan: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya".

Dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Hal ini juga ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa "KUHP tidak mengatur tentang hal demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP maka hakimlah yang diserahkan untuk mempertimbang hal tersebut". Kalau begitu, bagaimana menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Ditinjau dari segi



formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c, adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c, adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

1. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
2. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya,
3. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang alain,
4. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Nilai kesempurnaan alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c ditinjau dari “segi formal”.. Peninjauan nilai kesempurnaan itu semata segi formal ini dititik beratkan dari sudut “teoritis”. Belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan praktek, sebab kenyataan, apa yang dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian, melainkan sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yaitu sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti tersebut,



didasarkan pada beberapa asas yang antara lain:

Untuk mencari kebenaran materiil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), Dalam proses pemeriksaan perkara pidana bukan mencari kebenaran formal, hakim menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu, “dapat” disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Penjelasan Pasal 187 KUHP, yang memikul kewajiban bagi hakim, untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang maka kebenaran formal harus dianggap tidak memadai mendukung terwujudnya kebenaran sejati. Oleh karena itu, hakim bebas menilai kebenaran formal dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran sejati.

Ada beberapa asas yang harus menjadi pedoman dan dimiliki hakim antara lain: **Asas keyakinan hakim** dan **Asas batas minimum pembuktian**:

- Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHP, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHP. Berdasarkan Pasal 183, KUHP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”. Berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim baru boleh menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas bukti itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan “keyakinan hakim” menilai salah tidaknya seorang terdakwa, “memberi kebebasan” sepenuhnya kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang pengadilan. Walaupun telah terkumpul bukti yang dianggap cukup, hakim harus lagi menanyakan dan menguji kekuatan pembuktian itu dengan hati nuraninya. Kalau hatinya tidak yakin akan kesalahan terdakwa, hakim bebas dan berwenang melumpuhkan kekuatan pembuktian tersebut dengan “keyakinannya”. Akan tetapi, dalam mempergunakan kebebasan dan asas keyakinan, hakim harus benar-benar bertanggung jawab “demi mewujudkan kebenaran sejati”.

- Asas Batas Minimum Pembuktian Walaupun dikatakan, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasar ketentuan undang-undang adalah bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimana sifat kesempurnaan formal kesempurnaan yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, mesti tunduk pada asas "batas minimum pembuktian" yang telah ditentukan Pasal 183. kalau kita kembali melihat asas batas minimum pembuktian: "sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah". Bertitik tolak dari prinsip atau asas batas minimum pembuktian, bagaimanapun sempurnanya "satu" alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan dukungan paling sedikit "satu" alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183.

Dengan alasan dan penjelasan yang diuraikan, dapat diambil kesimpulan. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifat menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian "yang bebas". Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Dan memang pada prinsipnya, ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa fungsi visum et repertum di dalam sistem peradilan di Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materil dari kasus tindak pidana. Unsur keyakinan Hakimlah justru yang sangat menentukan kesalahan terdakwa, sekalipun disebut secara eksplisit di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang Hakim di dalam mengambil keputusannya. Sehingga membaca Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT harus digunakan penafsiran gramatikal yang berarti harus membaca utuh



---

Tidak boleh sepotong-potong karena dengan membaca keseluruhan dari Pasal 55 PKDRT dapat ditafsirkan bahwa pembuktian suatu perkara yang dianut dalam KUHAP cukup memenuhi persyaratan. Sehingga dapat diartikan bahwa aturan sistem pembuktian dalam KUHAP dan Undang-Undang PKDRT adalah sinergis dan saling mendukung.

#### IV. PENUTUP

Kekuatan pembuktian visum et repertum dan keterangan ahli sebagai alat bukti bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai instrumen pelengkap dan mempunyai kekuatan hukum baik sebagai keterangan ahli maupun keterangan surat di dalam mencari kebenaran materil dari kasus tindak pidana. Karena hakim dibatasi dengan asas keyakinan hakim dan Asas batas minimum pembuktian, sehingga unsur keyakinan hakimlah yang sangat menentukan kesalahan terdakwa; sekalipun disebut secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang Hakim di dalam mengambil keputusannya. Sehingga memahami isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT harus dapat ditafsirkan bahwa pembuktian suatu perkara yang dianut dalam KUHAP cukup memenuhi persyaratan. Sehingga dapat diartikan bahwa aturan sistem pembuktian dalam KUHAP dan Undang-Undang PKDRT adalah sinergis dan saling mendukung.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Artadi, Ibnu. 2005. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Syariah Edisi I Juli 2005. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardani, Syafira. 2004. *Dalam Pendampingan Korban Trafficking, dalam Jurnal Perempuan*. Edisi 36. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Harkrisnowo, Harkrituti. 2000. *Perempuan dan Hak Asasi dalam Perspektif Yuridis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation
- R. Soeparmono. 2001. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Sumarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

### II. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktek Kedokteran*.